

**PENERAPAN PRINSIP KERJA SAMA
DAN PRINSIP SOPAN SANTUN BERBAHASA
DI KALANGAN MASYARAKAT KAMPUNG PESISIR KOTA CREBON**

Oleh:

Syibli Maufur, M.Pd.*

*Dosen Jurusan PGMI FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email:cinta_ayah@rocketmail.com

ABSTRAK

Gaya bahasa masyarakat Cirebon dan pesisir berdasarkan watak dan letak geografisnya yang panas, cenderung apa adanya, lugas, ceplas-ceplos, keras nada dan intonasinya, dan terkesan kasar. Dalam menyelesaikan suatu masalah juga cenderung tidak suka berbelit-belit. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan masyarakat pedalaman yang penuh tatakrama, halus, dan tidak bernada tinggi. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kehidupan dan mengerti watak masyarakat pesisir, gaya bahasa seperti ini mungkin akan terdengar tidak santun. Akan tetapi, bagi penggunaanya, gaya bahasa yang keras dan lugas ini tidak berarti membuat bahasa masyarakat pesisir tidak santun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun Berbahasa di Kalangan Masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah bentuk penerapan prinsip kerja sama yang digunakan oleh masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon, (2) Bagaimanakah bentuk penerapan prinsip sopan santun yang digunakan oleh masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon, dan (3) Apakah strategi yang digunakan masyarakat kampung pesisir kota cirebon dalam merealisasikan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan.

Untuk menjawab pertanyaan, penulis menggunakan pendekatan pragmatik dengan desain penelitian kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari latar alamiah dengan metode observasi, catatan lapangan, wawancara, dan perekaman. Berkenanan dengan dengan rumusan masalah pertama, analisis data menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bentuk kerja sama yang tercermin dalam komunikasi masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon adalah (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim hubungan, dan (4) maksim cara. Selanjutnya, berkenaan dengan masalah kedua menunjukkan bentuk sopan santun berbahasa yang tercermin dalam komunikasi masyarakat kampung pesisir adalah (1) maksim kedermawanan, (2) maksim kearifan, (3) maksim pujian, (4) maksim kesetujuan, (5) maksim simpati, dan (6) maksim kerendahan hati.

Terakhir, strategi yang digunakan dalam merealisasikan maksim kerja sama dan sopan santun adalah (1) menggunakan kalimat langsung, dan (2) menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan kalimat tidak langsung direalisasikan melalui (1) menyetujui dan (2) menyindir.

Keyword : Gaya bahasa, Kesantunan, Kerja sama

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Bahasa mencerminkan budaya suatu masyarakatnya. Makin besar perbedaan budaya, maka semakin berbeda komunikasi antarmasyarakatnya. Setiap bahasa memiliki variasi dan gaya bahasa yang berbeda-beda dan unik. Perbedaan tersebut sangat erat hubungannya dengan cara pandang dan nilai yang dianut masyarakatnya.

Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan penting di pesisir utara Jawa dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Indonesia. Perubahan Cirebon dari kerajaan maritim menjadi kerajaan agraris menyebabkan perubahan pada sosiokultural masyarakatnya. Masyarakat pesisir Jawa termasuk masyarakat yang kosmolitan. Sebagai salah satu masyarakat pesisir, masyarakat Cirebon menunjukkan beberapa ciri yang membedakan dengan masyarakat yang lain, salah satunya adalah perbedaan pada gaya bahasa.

Sebagai masyarakat kosmopolitan, Cirebon dikenal dengan gaya bahasanya yang unik. Bahasa yang dipakai masyarakat Cirebon adalah perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang melahirkan gaya bahasa baru yang dikenal dengan istilah “dialek cirebonan”. Selain itu, gaya bahasa masyarakat Cirebon dan pesisir berdasarkan watak dan letak geografisnya yang panas, cenderung apa adanya, lugas, ceplas-ceplos, keras nada dan intonasinya, dan terkesan kasar. Dalam menyelesaikan suatu masalah juga cenderung tidak suka berbelit-belit. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan masyarakat pedalaman yang penuh tatakrama, halus, dan tidak bernada tinggi. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kehidupan dan mengerti watak masyarakat pesisir, gaya bahasa seperti ini mungkin akan terdengar tidak santun. Akan tetapi, bagi penggunanya, gaya bahasa yang keras dan lugas ini tidak berarti membuat bahasa masyarakat pesisir tidak santun.

Leech (1993: 206) mengatakan bahwa dalam berinteraksi perlu mempertimbangkan dan menerapkan Prinsip Sopan Santun (PS). Prinsip

sopan santun merupakan seperangkat maksim yang mengatur bentuk perilaku dalam berbahasa, baik perilaku linguistik maupun sosiolinguistik. Selanjutnya, berdasarkan pola skala kesantunan Leech (1983: 132), kesantunan tidaklah dapat dipandang dari simbol-simbol bahasa yang terucap saja. Kesantunan merupakan hasil dari suatu manifestasi budaya yang dianut oleh masyarakatnya.

Kesantunan dalam masyarakat pesisir Kota Cirebon, berkaitan dengan kaidah-kaidah atau norma yang dianut oleh masyarakatnya. Kesantunan tidak hanya menyangkut penggunaan bahasa untuk maksud tercapainya tujuan percakapan dan menunjukkan kehormatan dan harga diri seseorang kepada orang lain. Namun lebih dari itu, kesantunan menyangkut pula aspek-aspek budaya dan filosofi yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Kedudukan kesantunan yang penting pada masyarakat Cirebon, khususnya, dan masyarakat Jawa pada umumnya, dimotivasi oleh dua prinsip, yaitu Prinsip Rukun dan Prinsip Hormat (Suseno, 1993: 28). Kedua prinsip tersebut diwujudkan secara kongkret dalam kehidupan masyarakat Jawa sehari-hari.

Sementara itu, Grice (dalam Leech, 1993: 119) mengatakan bahwa keberhasilan percakapan juga tidak dapat ditentukan dari seberapa santun seseorang berbahasa, tetapi dapat mengarah pada penyamaan unsur-unsur pada transaksi kerja sama. Selanjutnya, Grice mengemukakan Prinsip Kerja sama (PK) yang berbunyi “Buatlah sumbangan percakapan Anda seperti diinginkan pada saat berbuicara, berdasarkan tujuan percakan yang disepakati atau arah percakapan yang sedang Anda ikuti”. Pola penerapan kerja sama tersebut dapat dilakukan melalaui (1) menyamakan tujuan jangka pendek, (2) menyatukan sumbangan partisipan sehingga penutur dan mitratutur saling membutuhkan, dan (3) mengusahakan agar peserta tutur mempunyai pengertian bahwa percakapan berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali jika bermaksud mengakhiri kerja sama.

Keunikan dan kekhasan tersebut membuat peneliti tergerak untuk meneliti secara mendalam fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan

mendalami Penerapan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun Berbahasa Masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon.

B. PEMBAHASAN

1) Konsep Pragmatik

Menurut Firth (dalam Wijana, 1996: 5) bahwa kajian penggunaan bahasa tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks. Sementara itu, Leech (1993: 8) mengatakan bahwa ilmu yang mampu mengkaji makna tuturan adalah ilmu pragmatik. Hal ini berbeda dengan semantik yang mengkaji makna kalimat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semantik mengkaji makna linguistik, sedangkan pragmatik mengkaji maksud tuturan.

Selanjutnya, Levinson (1983; 21-24) menjelaskan beberapa pengertian pragmatik. Pertama, untuk memahami makna bahasa, seorang penutur dituntut tidak saja untuk mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antarkata tersebut, tetapi juga menarik kesimpulan yang dikatakan sebelumnya. Kedua, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang kesesuaian antara kalimat yang dituturkan oleh pengguna bahasa dengan konteks yang melatarinya.

Sementara itu, Leech (1993: 70) berpendapat bahwa prinsip-prinsip pragmatik pada dasarnya bersifat nonkonvensional, yaitu dimotivasi oleh tujuan-tujuan percakapan. Senada dengan pendapat tersebut, Wijana (1996: 2) mengatakan bahwa pragmatik ialah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa.

Dimasukkannya konteks dalam memahami dan atau menghasilkan ujaran, dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip kerjasama dan sopan santun dalam berkomunikasi sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif. Konteks itu terkait dengan perilaku, situasi, interpretasi, dan budaya yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Apa yang dianggap penting dan menarik oleh masyarakat tertentu, bukan tidak mungkin dianggap biasa saja oleh masyarakat yang lain

Hal tersebut menunjukkan bahwa teori pragmatik pada dasarnya memperhatikan faktor-faktor proses komunikasi. Hymes (dalam Lubis, 1993; 84) mengemukakan adanya faktor-faktor yang menandai terjadinya peristiwa itu dengan singkatan SPEAKING. Adapun makna kata tersebut adalah S (setting/ konteks), P (partisipan), E (end/ tujuan), A (act/ tindakan), K (key/ ragam bahasa yang digunakan), I (instrumen/ alat yang digunakan), N (norma/ aturan yang harus ditaati), dan G (genre/ jenis kegiatan yang dilakukan).

2) Kerangka Sosiopragmatik dalam Analisis Kesantunan

Istilah pragmatik berangkat dari kajian mengenai penggunaan bahasa secara umum. Artinya ilmu pragmatik tidak mencakup hal-hal yang lebih spesifik, misalnya bentuk-bentuk kearifan dan budaya suatu masyarakat tertentu. Penelitian tentang berbahasa di masyarakat tidak dipandang semata-mata sebagai realitas kebahasaan, melainkan juga realitas sosial dan melibatkan persoalan budaya yang berkaitan dengan kenyataan bahwa representasi kesantunan berhubungan dengan sistem dan norma yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kerangka teori yang tepat untuk memahami fenomena tersebut adalah sosiopragmatik.

Kerangka sosiopragmatik merupakan perpaduan teori sosial dan teori pragmatik. Teori pragmatik menjelaskan bahwa suatu tuturan bukan semata sebagai satuan linguistik melainkan sebagai satuan pragmatik, yaitu unsur terkecil dalam komunikasi linguistik yang berupa gabungan antara ilokusi dengan preposisi. Satuan pragmatik dikaji dalam hubungannya dengan tujuan komunikasi dan tujuan sosial. Walaupun demikian, teori-teori pragmatik saja dipandang tidak cukup. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga digunakan teori sosial. Teori sosial menjelaskan bahwa proses interaksi seperti status (kedudukan) dan peran (fungsi) ditempatkan sesuai dengan sistem nilai budaya yang dianut masyarakat. Status menyangkut kedudukan, baik sebagai individu maupun kelompok, yang ditentukan oleh jabatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan peran

yaitu menyangkut apa yang harus dapat dilakukan berkaitan dengan status tersebut (Ibrahim, 1996).

Sosiopragmatik didasarkan pada kenyataan bahwa prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun digunakan secara berbeda dalam budaya kehidupan masyarakat yang berbeda pula dan dalam konteks sosial yang berbeda. Tidak bias digeneralisasikan bahwa budaya masyarakat Sunda dapat digunakan pada kehidupan masyarakat Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu pragmatik harus dikaitkan dengan kondisi sosial tertentu yang dianut oleh masyarakat tertentu. Dengan kata lain ilmu sosiopragmatik merupakan pertemuan antara masalah-masalah sosial dan pragmatik (Leech, 1993: 16).

3) Prinsip Kerja Sama

Menurut Grice (dalam Leech, 1993: 120) percakapan akan mengarah pada penyamaan unsur-unsur pada transaksi kerja sama yang semula berbeda dengan jalan (1) menyamakan tujuan jangka pendek, meskipun tujuan akhirnya berbeda atau bahkan bertentangan, (2) menyatukan sumbangan partisipan sehingga penutur dan mitra tutur saling membutuhkan, dan (3) mengusahakan agar penutur dan mitra tutur mempunyai pengertian bahwa transaksi berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali jika bermaksud mengakhiri kerja sama. Untuk keperluan tersebut, Grice mengemukakan prinsip kerja sama yang berbunyi “Buatlah sumbangan percakapan Anda seperti diinginkan pada saat berbicara, berdasarkan tujuan percakapan yang disepakati atau arah percakapan yang sedang Anda ikuti”. Prinsip yang digunakan dalam melakukan percakapan terdiri atas empat maksim, yaitu (1) maksim kualitas, (2) maksim kuantitas, (3) maksim hubungan, dan (4) maksim cara.

4) Teori-teori Kesantunan Berbahasa

Menurut Kasper (1990) dan Fraser (1990), teori-teori kesantunan dapat dibedakan ke dalam empat pandangan, yaitu pandangan norma-sosial (*social norm view*), kontrak-percakapan (*conversational contract view*), maksim-percakapan (*conversational maxim view*), dan penyelamat-muka (*face-*

saving view). Keempat pandangan tersebut di uraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

a) Pandangan Norma Sosial

Teori ini berlandaskan pada asumsi dasar bahwa setiap masyarakat mempunyai seperangkat norma yang terdiri atas sejumlah kaidah eksplisit. Kaidah itu ditentukan oleh perilaku tertentu, lingkungan, dan cara berpikir masyarakat tersebut. Suatu bentuk tindak berbahasa dianggap pasif (santun) bila cocok (*congruence*) dengan norma. Sebaliknya, suatu tindak berbahasa tergolong negative (tidak santun) bila berlawanan dengan norma (Fraser, 1990: 220).

Pandangan norma-sosial dikembangkan mulai tahun 1872 oleh Jhon S.Locke dalam tulisannya yang berjudul *Ladies'Book of Etiquette and Manual of Politenees*. Dalam tulisan tersebut dikemukakan pedoman tentang kesantunan dan etika bagi masyarakat inggris. Menurut Jhon Locke (dalam Fraser, 1990), kesantunan dikaitkan dengan gaya berbicara. Makin Formal gaya bicara seseorang dianggap makin santun, sebaliknya, gaya bicara tidak Formal dianggap tidak santundan kasar.

Teori itu banyak kelemahannya sehingga kurang diminati. Fraser (1990: 221), misalnya, menyatakan bahwa pandangan ini menitikberatkan pada penggunaan bahasa (*language usage*), dan bukan pada pendayagunaan bahasa (*language use*). Prinsip kesantunan menurut teori ini berupa sebuah daftar tentang tindak mana yang santun dan mana yang tidak santun. Hal ini tidak konsisten dengan asumsi dasar teori ini.

b) Pandangan Maksim Percakapan

Pandangan Maksim Percakapan (MP) diusulkan oleh Lakof (1972) dan leech (1983,19983). Maksim percakapan bertitik tolak dari teori prinsip terutama menyangkut prinsip tentang apa yang akan dan harus dikatakan, kapan harus mengatakannya, dan bagaimana harus mengatakannya. Penerapan prinsip kerjasama dan maksin percakapan

dilakukan oleh Laqof (dalam Ibrahim: 1983. Leech: 19983) dengan menambahkan nosi kegramatikalalan dan menghubungkannya dengan nosi kesempurnaan bentuk-bentuk dalam komponen pragmatik berdasarkan nosi kegramatialalan dan kesempurnaan bentuk, penutur dapat memilih salah satu dari dua prinsip ketika berbicara, yaitu (1) jelas (*be clear*) memiliki kerjasama dansantun (*be polite*) yanngg terdiri atas 3 prinsip, yaitu (a) tidak mengganggu, (b) member pilihan, dan (c) membuat enak hati. Prinsip tidak mengganggu di gunakan bila di perlukan kesantunan formal atau inpersona. Prinsip member pilihan di gunakan jika di perlukan kesantunan formal sedangkan prinsip membuat enak hati di gunakan jika di perlukan kesantunan intim. Kemampuan penutur untuk memilih salah satu prinsip itu di sebut kompetensi pragmatif

Penerapan ke 3 prinsip tersebut masing-masing bergantung pada situasi yang di pahami penutur jika penutur menyadari bahwa situasinya akrab atau intim, maka perintah mengambil jaket akan di sampaikan, misalnya, dengan prinsip ke 3. Jika penutup menyadari situasinya informal, maka akan di tuturkan prinsip kedua. Sebaliknya, jika penutur menyadari situasinya formal maka akan menggunakan prinsip pertama.

Teori maksim percakapan selanjutnya disempurnakan oleh leech (1993). Prinsip kerjasama diterapkan leech dengan memusatkan diri pada ranah pragmatik retorik yang bertujuan mendikripsikan tujuan perilaku linguistic ia membedakan antara tujuan ilokusioner penutur, yaitu apa yang di maksudka penutur untuk di sampaikan melalui tuturan dan tujuan social penutur, yaitu posisi yang membuat penutur harus bersikap jujur, santun, ironis, dan semacamnya adalah berbicara.

Bila sebagai retorika tekstual pragmatik membutuhkan prinsip kerja sama, maka sebagai retorika interpersonal pragmatik membutuhkan prinsip lain yaitu prinsip sopan santun (PS). Menurut Leech (1993) PS memiliki sejumlah maksim, yakni (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*), (5) maksim

kecocokan (*agreement maxim*), dan (6) maksim kesimpatian (*sympathy maxim*) (Wijana, 1996:55-56).

Sebelum memberikan lebih jauh ke enam maksim kesopanan tersebut sebaiknya terlebih dahulu diterangkan mengenai bentuk-bentuk ujaran yang digunakan untuk mengekspresikan maksim-maksim di atas. Bentuk-bentuk ujaran yang dimaksud adalah bentuk ujaran komisif, yakni bentuk ujaran yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, ujaran impositif digunakan untuk menyatakan perintah atau suruhan, ujaran ekspresif adalah ujaran yang digunakan untuk menyatakan sikap psikologis pembicara terhadap suatu keadaan, dan ujaran asertif lazim digunakan untuk menyatakan kebenaran proposi yang diungkapkan. Maksim-maksim di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, *maksim kebijaksanaan*. Maksim ini digunakan dengan turunan impositif dan komisif, dan menggariskan peserta tutur untuk meminimalkan kerugian orang lain, dan memaksimalkan keuntungan orang lain. Kedua, *maksim kedermawanan*. Maksim ini diurutkan dengan kalimat komisif dan impositif, dan mewajibkan peserta tindak tutur untuk memaksimalkan kerugian diri sendiri, dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Ketiga, *maksim pujian*. Maksim ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan asertif, dan menurut peserta tindak tutur memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Keempat, *maksim keindahan*. Maksim ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan asertif, dan menuntut peserta tindak tutur tidak memaksimalkan kehormatan diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Kelima, *maksim kesepakatan*. Maksim ini diutarakan dengan kalimat asertif dan ekspresif, menurut peserta tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka, dan meminimalkan rasa ketidakcocokan di antara mereka. Keenam, *maksim simpati*, maksim ini diutarakan dengan kalimat asertif dan ekspresif, dan mengharuskan

peserta tindak tutur memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antipasti lawan turunya.

Dibandingkan dengan kedua pandangan di muka, pandangan maksim percakapan cukup logis. Akan tetapi, pandangan ini tidak dapat diterapkan dengan mudah dalam analisis karena tidak menyajikan langkah-langkah yang konkret dan operasional. Masalahnya, kriteria-kriteria apakah yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan maksim-maksim di dalam tuturan, bagaimanakah suatu tuturan dapat dikatakan jelas, dan criteria apakah yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kejelasan.

c) Pandangan Penyelamat Muka

Teori tentang kesantunan yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Brown dan dan Levinson (1978). Menurut Brown dan Levinson, kesantunan hakikatnya berupa tindak menyelamatkan muka. Nosi muka ini terbagi dalam dua sisi, yaitu muka negatif dan muka positif. Yang dimaksud muka negatif adalah keinginan setiap orang yang akan menjaga agar citra dirinya (kehormatan, harga diri, dan sebagainya) tidak tereancam oleh suatu turunan (Tt). Misalnya, ketika seseorang meminjam uang, ia akan menyatakannya dengan cara tertentu, agar bila maksudnya ditolak dia tidak kehilangan muka. Muka positif mengacu pada citra setiap orang. Setiap orang (yang rasional) mempunyai standar nilai-nilai sehingga dapat sehingga dapat memilah-milah perilaku yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, mereka akan berusaha agar perilakunya dapat dihargai, dinilai baik, dan disenangi orang lain.

Tindak tutur secara intrinsik dapat mengancam muka seseorang. Tuturan yang demikian disebut Tindak mengancam muka (TMM) atau *face-threatening act*. tindak memerintah, tindak menyarankan, tindak mengancam, dan tidak mengingatkan, misalnya, akan mengancam muka negatif petutur. Tindak mengeluh, tindak mengkritik, dan tindak menolak dapat mengancam muka positif penutur.

Asumsi dasar prinsip sopan santun adalah bahwa setiap penutur akan memperkirakan seberapa tinggi tingkat ancaman atau gangguan suatu tuturan. Untuk itu, ada tiga variabel bebas yang harus dipertimbangkan pada pemilihan tingkat kesantunan. Variabel pertama adalah jarak social (*social distance*) . variabel ini member efek tingkat keakraban (*familiarity*) dan solidaritas (*solidarity*) antara penutur dan petutur. Variabel kedua adalah tingkat kekuasaan relatif (*relative power*) penutur dan petutur. Variabel ini member efek tingkat penentuan keinginan penutur trhadap petutur. Dan variabel ketiga adalah tingkat keabsolutan ancaman atau gangguan suatu tuturan dipandang dari konteks budaya penutur. Artinya, seberapa tindak tutur itu dapat dibenarkan menurut norma social yang dianut dan seberapa besar seberapa besar tingkat toleransi petutur terhadap ancaman atau gangguan itu (Brown dan Levinson, 1987).

d) Bentuk-bentuk Kesantunan

Berdasarkan konsep dasar teori penyelamat muka bahwa partisipan cenderung berupaya memelihara muka dari ancaman tindak tutur maka dapat diduga penutur akan memilih cara yang tepat untuk melindungi muka dari tuturan yang tidak santun. Cara itu dapat berupa bentuk strategi atasan, dapat pula berupa bentuk kesantunan bawahan. Yang termasuk dalam bentuk kesantunan atasa adalah (a) tanpa tindak perbaikan, (b) kesantunan positif, (c) kesantunan negatif, (d) kesantunan *off record*, dan (e) tidak menyatakan tindak mengancam muka (Brown dan Levinson, 1978:74). Adapun bentuk kesantunan bawahan mencakup wujud lebih rinci dari masing-masing bentuk atasan.

Bentuk kesantunan dengan tuturan tanpa perbaikan berarti penutur menganggap bahwa tindak tuturnya tidak berkaitan dengan upaya mempertahankan muka dari prinsip kerja sma. Hal ini dapat terjadi, jika baik penutur maupun petutur tidak berkeinginan mengendalikan percakapan, atau jika keduanya menganggap bahwa tuturannya tidak

berhubungan dengan tindak mengancam muka. Kesantunan positif dipakai untuk meminimalkan tindak acaman dengan menentramkan petutur agar tuturan yang pada dasarnya santun menjadi lebih santun. Untuk itu, penutur dapat menekankan kesan mempunyai keinginan yang sama dengan petutur, atau menekankan kesan bahwa mereka berada dalam satu grup. Kesantunan negatif digunakan untuk menjaga wilayah teritorial atau kekuasaan agar tuturan yang kurang santun menjadi santun. Cara yang digunakan, misalnya, dengan cara meminta maaf, menggunakan tuturan tidak langsung, dan berbicara secara formal. Adapun kesatuan *off record* dipakai untuk merespon ancaman tertinggi karena suatu tuturan yang tidak santun. Cara yang dipilih adalah membiarkan petutur menginterpretasikan sendiri suatu tuturan atau bahkan diam sedangkan dengan cara tidak menyatakan tidak mengancam muka maka cara kesantunan sebenarnya tidak diperlukan karena suatu tuturan tidak mengancam muka penutur maupun petutur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat ditelaah, ditemukan sejumlah rumusan tentang bentuk kesantunan bawahan. Dari sudut pandang pragmatik, ditemukan rumusan bentuk kesantunan bawahan yang tergolong dalam bentuk kesantunan positif, negative, dan *off record*. Bentuk-bentuk kesantunan tersebut, antara lain sebagai berikut.

Menurut Leech (1993), strategi kesantunan positif dapat dilakukan dengan delapan cara yaitu (1) memperhatikan minat, keinginan, dan kebutuhan petutur, (2) kesetujuan dan simpati pada petutur, (3) menekankan perhatian kepada petutur, (4) menggunakan penanda kelompok, (5) menghindari ketidaksetujuan, (6) mempraduga atau menegaskan kesamaan pandangan, (7) bercanda, dan (8) menyertakan penutur maupun petutur dalam aktivitas, member atau menanyakan alasan.

Begitu pula dengan strategi kesantunan negatif memiliki delapan cara. Masing-masing adalah (1) menyatakan dengan tuturan tak langsung, (2) bertanya, membatasi, (3) bersikap pesimis, (4)

meminimalkan paksaan, (5) menyatakan rasa hormat, (6) meminta maaf dengan cara inkonvensional, (7) tidak menyertakan penutur maupun petutur, dan (8) menyatakan tingkat ancaman sebagai kaidah umum. Untuk strategi kesantunan *off record* ada lima pilihan yaitu (1) tautologi, (2) ironi, (3) pertanyaan retorik, (4) metafora, dan (5) tuturan tidak lengkap. Hal seperti itu dilakukan karena berkaitan dengan aspek linguistic, seperti pilihan kata dan pilihan kalimat. Juga aspek pragmatik, seperti yang berbicara dengan siapa, kapan, dimana, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa, selain itu, aspek sosial, seperti kekuasaan dan status sosial dan aspek kebudayaan seperti tingkat toleransi partisipan tutur terhadap ancaman suatu tindak tutur. Dengan adanya aspek-aspek kebudayaan itu maka pemilihan strategi kesantunan suatu kelompok masyarakat budaya berbeda dengan kelompok budaya lain.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2000: 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai ciri (1) menggunakan setting alamiah, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih mempertimbangkan proses daripada hasil, (4) menganalisis data secara induktif, dan (5) makna merupakan bagian utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk penerapan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun dalam wacana lisan di kalangan dwibahasawan masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari setting alamiah, yaitu wacana lisan atau percakapan yang dilakukan masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Dalam pembahasan hasil analisis digunakan data yang diperoleh peneliti berupa rekaman dan catatan lapangan, baik yang berupa deskripsi maupun refleksi.

Data penelitian ini diambil atau bersumber dari percakapan atau wacana lisan yang dilakukan masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka sumber data dalam

penelitian ini bersumber pada dua hal. Data pertama berisi tentang bentuk penerapan prinsip kerja sama yang digunakan oleh masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Sedangkan data kedua berisi tentang bentuk penerapan prinsip sopan santun yang digunakan oleh masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Istilah subjek penelitian dalam penelitian ini mempunyai acuan yang hampir sama dengan istilah informan yang digunakan Samarin (1967) yang menyatakan bahwa informan adalah penutur bahasa sasaran yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan bahasa.

Berdasarkan terminologi subjek penelitian yang disampaikan Samarin tersebut, maka subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Dalam memilih subjek, peneliti menggunakan cara berikut. Pertama, dilakukan pengamatan terhadap calon subjek. Kedua, menggunakan pedoman wawancara untuk menjaring subjek terpilih. Selain itu, membuat kesepakatan mengenai bentuk pergaulan yang wajar antara subjek dengan peneliti. Dengan pertimbangan informan tersebut ditentukan subjek yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) berusia antara 20 sampai 60 tahun, (2) asli anggota masyarakat pesisir, (3) memahami adat istiadat kampung pesisir, dan (4) jasmani dan rohaninya memiliki kemampuan untuk menjadi subjek.

Teknik Pengumpulan Data

Tidak ada satu pun metode yang terbaik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tentang pola penggunaan bahasa dalam masyarakat. Ketepatan penggunaan metode pengumpulan data bergantung pada hubungan antara peneliti dengan masyarakat pemakai bahasa, jenis data yang dikumpulkan, dan situasi-situasi khusus yang dijumpai dalam kegiatan pengumpulan data. Moleong (2000: 167) mengatakan bahwa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat melalui observasi partisipasi, observasi nonpartisipasi, dan wawancara.

Metode observasi dilakukan sebagai berikut. Pertama, peneliti terjun langsung dan terus menerus serta melibatkan diri secara aktif dalam

pergaulan subjek. Kedua, peneliti hanya berperan sebagai penerima dan bukan sebagai sasaran tindak tutur.

Data yang diperoleh melalui observasi diperkaya dengan informasi tambahan yang diperoleh melalui wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk mengungkap atau mengklarifikasi fenomena yang muncul. Selain itu, peneliti juga melakukan perekaman yang digunakan sebagai data primer dalam analisis data.

Untuk menjaga keterandalan data, dilakukan kegiatan triangulasi. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan (1) menambah data dari subjek penelitian, dan (2) pendiskusian data dengan pakar dan teman sejawat tentang keterandalan data.

Tehnik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan model alir yang diadaptasi dari model analisis data kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta triangulasi data, dan penarikan simpulan.

Data dengan model interaktif-dialektis sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (1992) yang mendasarkan pada prinsip bahwa analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Oleh karena itu, bersamaan dengan pengumpulan data dan segera setelah data diperoleh dilakukan reduksi data. Kegiatan reduksi data ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi.

Data yang dikumpulkan melalui perekaman, ditranskripsikan ke dalam bentuk tertulis, khususnya data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data yang ditranskripsikan ini diidentifikasi dengan memberikan nomor urut dan penomoran file.

Selanjutnya, data yang sudah teridentifikasi tersebut diklasifikasikan dan dikodifikasikan sesuai dengan data yang ingin ditetapkan. Data tersebut diklasifikasikan berikut, (1) bentuk penerapan prinsip kerja sama yang dilakukan masyarakat kampung Pesisir, Kota Cirebon, (2) bentuk penerapan

pinsip prinsip sopan santun yang dilakukan masyarakat kampung Pesisir, Kota Cirebon, dan (3) strategi yang digunakan masyarakat kampung Pesisir, Kota Cirebon dalam merealisasikan kedua prinsip tersebut.

Setelah data tersebut direduksi, selanjutnya dilakukan penyimpulan sementara. Sebelum dilakukan penyimpulan akhir, dilakukan triangulasi. Apabila ada data yang muncul hanya satu kali, maka dilakukan (1) penjarangan data instropektif dari subjek penelitian dan (2) diskusi dengan pakar dan teman sejawat tentang keterandalan data tersebut.

D. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Prinsip Kerja Sama

Menurut Grice (dalam Leech, 1993: 120) percakapan akan mengarah pada penyamaan unsur-unsur pada transaksi kerja sama yang semula berbeda dengan jalan (1) menyamakan tujuan jangka pendek, meskipun tujuan akhirnya berbeda atau bahkan bertentangan, (2) menyatukan sumbangan partisipan sehingga penutur dan mitra tutur saling membutuhkan, dan (3) mengusahakan agar penutur dan mitra tutur mempunyai pengertian bahwa transaksi berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali jika bermaksud mengakhiri kerja sama. Berkenanan dengan hal tersebut, analisis data menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bentuk kerja sama yang tercermin dalam komunikasi masyarakat kampung Pesisir kota Cirebon adalah

a) Prinsip Kuantitas

Prinsip kuantitas menuntut seorang penutur mampu memberikan informasi yang cukup, singkat, dan padat. Selain itu, penutur juga harus berbicara apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi pembicaraan. Contoh penerapan maksim kuantitas dapat dilihat pada data berikut.

- a. *Ang, priben cara nguruse kih?*
- b. *Wis, pokoke ente mene bae. Nko dibantu kita*

Catatan; Biasanya menggunakan frasa atau kata *y wis* atau *pokoke* dengan tujuan untuk mempersingkat pembicaraan.

b) Prinsip Kualitas.

Maksim kualitas digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang nyata sesuai dengan fakta. Selain itu, fakta tersebut harus didukung dengan bukti yang jelas. Dengan kata lain, penutur akan berusaha akan menyampaikan apa yang diyakininya benar. Contoh penerpakan maksim kualitas dapat dilihat pada data berikut.

- a. *Jadi bagiane kita mendi wa?*
- b. *Bagian Aang gak ada. Kata Pak Makmur, bagian Mas Syukur dimasukkan saja ke pengurus.*
- c. *Wah, ya gak bisa. Punten, ini berbicara dengan tenaga orang. Jadi harus saling menghargai lah. Saya kan sudah ngawas 3 hari. Saya Cuma minta bagian yang 3 hari tersebut.*

Catatan: Jika merasa apa yang diyakininya benar, kadang nada yang diucapkan terdengar keras dan kasar.

c) Prinsip Cara.

- a. Menghindari ungkapan yang membingungkan
- b. Menghindari ambiguitas
- c. Bicaralah secara singkat

Maksim cara mengharuskan peserta berbicara secara langsung, tidak kabur, dan tidak ambigu. Maksim ini juga menuntut peserta tutur mampu menafsirkan informasi yang digun akan lawan uturnya sesuai konteks.

2. Penerapan Prinsip Sopan Santun

Selanjutnya, berkenaan dengan masalah kedua menunjukkan bentuk sopan santun berbahasa yang tercermin dalam komunikasi masyarakat kampung pesisir adalah :

a) Prinsip Kedermawanan

Maksim kedermawanan merupakan bentuk kebesaran hati seseorang. Maksim ini mewajibkan seorang penutur untk memaksimalkan kerugian diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan diri sendiri. Maksim ini juga mewajibkan seorang penutur mampu memaksimalkan keuntungan orang

lain. Bentuk penerapan maksim kedermawanan tersebut dapat dilihat pada data berikut.

“Pokoke ari dolan ning umah kita kudu mangan. Ari bli mangan berarti bli nganggap sedulur”. (Pokoknya kalau main ke rumah saya harus makan. Kalau tidak, berarti tidak menganggap saudara)

b) Prinsip Kearifan

Maksim ini digunakan untuk meminimalkan kerugian orang lain dan memalsimalkan keuntungan orang lain. Dengan kata lain, maksim ini diterapkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain agar pesan yang disampaikan penutur tidak menyinggung mitra tutur. Contoh penerapan maksim tersebut dapat dilihat pada data berikut.

- a. *Waduh pak, kita lagi akeh kegiatan. Priben kih jadie.* (waduh pak, saya sedang banyak kesibukan. Jadi bagaimana)
- b. *Ya wis, tenang bae. Kita sih ana bae ning umah.* (Ya sudah, tenang saja. Saya ada di rumah saja)

Catatan: Biasanya menggunakan frasa *y wis* atau *tenang bae*

c) Prinsip Pujian

Maksim pujian merupakan strategi yang bertujuan untuk menyenangkan orang lain. penggunaan maksim ini menuntut penutur memaksimalkan rasa hormat kepada lawan tutur dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. maksim ini juga bias diartikan sebagai *rayuan* agar lawan tutur terjebak untuk tidak marah atau mengikuti apa yang diinginkan penutur. Data (8) dan (9) di bawah ini menunjukkan adanya bentuk penerapan maksim pujian.

- a. *Ari RW kita ku jujur. Mangkae kepilih maning.* (Kalau RW saya itu orangnya jujur. Makanya dipilih lagi)
- b. *Ira bisa bae kah.* (kamu bisa saja nih)

Konteks: Rumah RW

d) Prinsip Kesetujuan

Maksim kesetujuan merupakan maksim yang menuntut seseorang memiliki kebesaran hati untuk mengalah. Pernyataan menyetujui

merupakan satu strategi yang dilakukan penutur agar percakapan dapat berjalan dengan lancar.

- a. *Priben Pak Warma, kita kang ngomong bae ning wonge tah?*
(Bagaimana Pak Warma, saya yang berbicara ke orangya saja)
- b. *Y wis, bli papa. Tapi kitae bli mono y.* (Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya tidak ke sana)
- c. Ok.

Catatan: Biasanya menggunakan farasa *y wis* atau *ok* sebagai bentuk kesetujuan

e) Prinsip Simpati

Maksim simpati merupakan maksim yang menuntut rasa tenggang rasa seseorang kepada orang lain. Selain itu, maksim ini juga menuntut peserta tutur untuk meminimalkan rasa empatinya kepada orang lain.

- a. *Jare malwut ente langka?* (katanya orang tua kamu sudah meninggal)
- b. *Ya ang.* (Betul).
- c. *Kita melu belasungkawa bae. Punten, waktu kuen bli bisa mono.* (saya ikut belasungkawa. Maaf, waktu itu tidak bisa ke sana).

Catatan: Biasanya diungkapkan dengan nada yang lembut atau menggunakan kata maaf/punten.

f) Prinsip Kerendahan Hati

Prinsip dari maksim ini adalah pujilah diri sendiri sedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Penerapan maksim ini juga menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi atau kesombongan pribadi kepada orang lain. Bentuk penerapan maksim kerendahan hati yang tergambar dalam percakapan masyarakat kampung pesisir Kota Cirebon dapat dilihat pada contoh data berikut.

- a. *Pak warma akeh kesibukan bae y. Maklum ari akeh ilmue mengkonon.*
(Pak Warma banyak kesibukan saja. Maklum kalau banyak ilmunya bergitu).
- b. *Beli sih. Kebeneran bae kitae ngerti.* (tidak kok. Kebetulan saja saya mengerti)

E. SIMPULAN

Fenomena penggunaan bahasa dimasyarakat tidak hanya dapat dipandang sebagai realitas pragmatic saja, melainkan harus dilihat sebagai realitas social. Dengan alasan tersebut, maka rancangan yang tepat untuk dipakai adalah rancangan sosiopramatik. Data penggunaan bahasa diinterpretasikan berdasarkan sudut pandang budaya pemakai bahasa tersebut. Oleh karena itu, interpretasi terhadap fakta-fakta pragmatic seperti peran maksim, situasi, dan tingkat gangguan dikaitkan dengan aspek-aspek cultural seperti latar belakang budaya, adat istiadat, dan lingkungan sosial.

Dalam merealisasikan prinsip kerja sama dan sopan santun adalah (1) menggunakan kalimat langsung, dan (2) menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan kalimat tidak langsung direalisasikan melalui (1) bercanda, (2) menyetujui, (3) menggunakan kata maaf, dan (4) menyindir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa
- Ayatrohaedi. 1985. *Bahasa Sunda di Daerah Cirebon*. Jakarta: Balai Pustaka
- Bogdan, dan Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Chaniago, Muktar dkk. 2001. *Pragmatik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Dhofier, Zamarkashi. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES
- Ibrahim, Abd Syukur. 1993. *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional.
- _____ 1994. *Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Leech, G. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D. Oka. Jakarta: UI
- Levinson, Stepen. 1983. *Pragmatiks*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lubis, A. Hamid Hasan. 1993. *Analisis Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

- Miles, M.B, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan: Tjetjep R. Jakarta: UI
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nababan, PWJ. 1987. *Ilmu Pragmatik*. Jakarta: P2LPTK Dikbud.
- Samarin., W.J. 1988. *Ilmu Bahasa lapangan*. Terjemahan oleh J.S. Badudu. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudjana, T.D. 1988. *Legitimasi Peta Dialek Bahasa Cirebon*. Makalah dalam Saresehan Bahasa Cirebon. Cirebon; BKKN Cirebon.
- Tarigan, H.G. 1986. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.